



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 180/Kep.388-Bag.Kum/2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG TAHUN 2024

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Bandung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Bandung Tahun 2024.
- KEDUA : Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan usulan Perangkat Daerah dan untuk ditindaklanjuti bersama pada Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Agenda penyampaian Program Pembentukan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Dalam keadaan tertentu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Wali Kota meskipun tidak termasuk dalam agenda Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota.

- KELIMA : Kepada Perangkat Daerah pemrakarsa atau terkait langsung secara substansi dengan agenda Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota untuk segera mempersiapkan pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota dan berkoordinasi dengan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung dan memperhatikan tahapan/mechanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Januari 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR : 180/Kep.388-Bag.Kum/2024
 TENTANG
 PENETAPAN RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN
 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG TAHUN 2024

**RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH KOTA BANDUNG
 TAHUN 2024**

NO. 1	TENTANG 2	MATERI POKOK 3	STATUS 4		PELAKSANAAN 5	Perangkat Daerah 6	TARGET PENYAMPAIAN 7	KET 8
			BARU	UBAH				
1.	Tata Cara Pemungutan Pajak		✓			Bapenda	2024	
2.	Perhitungan Nilai Sewa Reklame		✓			Bapenda	2024	
3.	Peraturan Zonasi		✓			Disciptabintar	2024	
4.	Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang		✓			Disciptabintar	2024	
5.	Rencana Detail Tata Ruang Kota		✓			Disciptabintar	2024	
6.	Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah		✓			Bag. Organisasi	2024	

NO. 1	TENTANG 2	MATERI POKOK 3	STATUS 4		PELAKSANAAN 5	Perangkat Daerah 6	TARGET PENYAMPAIAN 7	KET 8
			BARU	UBAH				
7.	Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah		✓			Bag. Organisasi	2024	
8.	Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana		✓			DPKB	2024	
9.	Tata Cara Pemeriksaan Sebab Kebakaran		✓			DPKB	2024	
10.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Modal		✓			DPMPTSP	2024	
11.	Tata Naskah Dinas Elektronik		✓			Diskominfo	2024	
12.	Perubahan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung			✓		Setwan DPRD Kota Bandung	2024	

NO. 1	TENTANG 2	MATERI POKOK 3	STATUS 4		PELAKSANAAN 5	Perangkat Daerah 6	TARGET PENYAMPAIAN 7	KET 8
			BARU	UBAH				
13.	Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas		✓			Bag.Kesra	2024	
14.	Standar Infrastruktur yang ramah Bagi Penyandang Disabilitas		✓			Bag.Kesra	2024	
15.	Perubahan Atas Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pencatatan dan Pelaporan Barang Persediaan			✓		BKAD	2024	
16.	Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame di Jembatan penyebrangan Orang (JPO)		✓			DisHub	2024	
17.	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Biaya Paksa Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019		✓			SatPol PP	2024	

NO. 1	TENTANG 2	MATERI POKOK 3	STATUS 4		PELAKSANAAN 5	Perangkat Daerah 6	TARGET PENYAMPAIAN 7	KET 8
			BARU	UBAH				
18.	Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat dan Pembinaan Pengawasan dalam Ketertiban Umum, Kententraman dan Perlindungan Masyarakat		✓			SatPol PP	2024	
19.	Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		✓			DPMPPTSP	2024	
20.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 354 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan			✓		Bapelitbang	2024	
21.	Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah		✓			BKAD	2024	

NO. 1	TENTANG 2	MATERI POKOK 3	STATUS 4		PELAKSANAAN 5	Perangkat Daerah 6	TARGET PENYAMPAIAN 7	KET 8
			BARU	UBAH				
22.	Tata cara Pelaksanaan Sewa Tanah dan/atau Bangunan Milik Daerah		✓			BKAD	2024	
23.	Pengamanan Barang Milik Daerah		✓			BKAD	2024	
24.	Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Persediaan		✓			BKAD	2024	
25.	Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung		✓			Bag. Org	2024	
26.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 677 Tahun 2016 tentang Disiplin Kehadiran Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung			✓		Bag. Org	2024	
27.	Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung		✓			Bag. Org	2024	

NO. 1	TENTANG 2	MATERI POKOK 3	STATUS 4		PELAKSANAAN 5	Perangkat Daerah 6	TARGET PENYAMPAIAN 7	KET 8
			BARU	UBAH				
28.	Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung		✓			Bag. Org	2024	
29.	Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja		✓			Satpol PP	2024	
30.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 677 Tahun 2016 tentang Disiplin Kehadiran Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung			✓		Bag. Org	2024	
31.	Jenis Jabatan Fungsional		✓			Bag. Org	2024	
32.	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung		✓			Bag. Org	2024	
33.	Proses Bisnis		✓			Bag. Org	2024	
34.	Senandung Perdana		✓			DP3A	2024	
35.	Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga Tingkat Kota dan Tingkat Kecamatan di Kota Bandung		✓			DP3A	2024	
36.	Pedoman Pengelolaan Arsip Aktif		✓			Disarpus	2024	

NO. 1	TENTANG 2	MATERI POKOK 3	STATUS 4		PELAKSANAAN 5	Perangkat Daerah 6	TARGET PENYAMPAIAN 7	KET 8
			BARU	UBAH				
37.	Tata Cara Penomoran Naskah Dinas		✓			Disarpus	2024	
38.	Kode Klasifikasi Arsif		✓			Disarpus	2024	
39.	Pedoman Pengelolaan Arsif Terjaga		✓			Disarpus	2024	
40.	Optimalisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Bandung dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah		✓			Setwan	2024	
41.	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Subsidi Barang Kebutuhan Pokok			✓		Disdagin	2024	
42.	Pembentukan dan Pemberdayaan Ruang Kreatif Kota Bandung		✓			Disbudpar	2024	
43.	Pelaksanaan Perluasan Kesempatan Kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif		✓			Disbudpar	2024	
44.	Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana		✓			Diskar PB	2024	
45.	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bandung Tahun 2024-2028		✓			Dinsos	2024	

NO. 1	TENTANG 2	MATERI POKOK 3	STATUS 4		PELAKSANAAN 5	Perangkat Daerah 6	TARGET PENYAMPAIAN 7	KET 8
			BARU	UBAH				
46.	Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah		✓			Bag. Org	2024	

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002